



TAHUN 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



DPPKB

Purnawarman Barat No. 5/9
PURWAKARTA

DPPKB PURW

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Purnawarman Barat No. 5/9 Purwakarta telp/fax. 201006 Kode Pos. 41112



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas perkenan-Nya kami telah diberi kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwokerto Tahun 2022.

Laporan ini disusun berkenaan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwokerto Tahun Anggaran 2021 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwokerto Tahun 2018-2023.

Selama Tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai, namun demikian masih ada capaian kinerja yang belum berhasil dicapai. Capaian kinerja dimaksud dipaparkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwokerto Tahun 2022.

Capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum sempurna, akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam upaya pemenuhan visi dan misi organisasi. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan



Peningkatan kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Purwokarta.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian data maupun kegiatan. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan masukan untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu produk laporan yang tersusun secara optimal dan berkualitas.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Semoga ALLAH SWT, senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan dan kesanggupan dalam mengemban tugas-tugas yang dibebankan sebagai amanah kepada kita semua serta mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat, aamiin.

Purwokarta, Desember 2022

KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA



H. YAYAT H. JAYAT, S. Sos
NIP.19700215 199703 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB	4
1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis)	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
2.2. Pernyataan Perjanjian Kinerja	14
2.3. Formulir Pernyataan Kinerja	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	32
BA IV : PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Eselonering dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022.....	6
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2022	7
Tabel 2.1.	Formulir pernyataan kinerja tahun 2022.....	15
Tabel 3.1	Sasaran Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.....	25
Tabel 3.2	Sasaran Meningkatnya kualitas kampung KB, Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja, Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil, dan Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan.....	27
Tabel 3.3	Sasaran Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK.....	29
Tabel 3.4	Rincian Anggaran DPPKB Kabupaten Purwakarta	32
Tabel 3.5	Rincian Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPPKB Kabupaten Purwakarta	33
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja Misi I : Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas Melalui Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	36
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Kinerja Misi II : Mewujudkan Ketahanan Keluarga Secara Optimal Melalui Pembinaan Keluarga	37
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Kinerja Misi III : Misi III : Membangun Jejaring Kemitraan dan Pengelolaan Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).....	38



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan
4. Laporan Cascading
5. Formulir Penetapan Kinerja
6. Pohon Cascading



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta kepada pihak-pihak yang memberi amanah sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategik Tahun 2018-2023.

Selain sebagai media pertanggung jawaban kepada publik/pemberi mandat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah menetapkan 6 (enam sasaran stratejik dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan 4 (empat) program yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Kinerja yang tercapai dengan kriteria kurang disebabkan oleh selain kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana (PLKB/PKB) sehingga tidak dapat memenuhi target 1 petugas satu desa/kelurahan. Selain itu juga anggaran yang tersedia tidak memadai dan pengambil kebijakan tidak



memahami akan pentingnya penambahan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Dan terhadap kinerja yang kurang diupayakan penyempurnaan antara lain mengefektifkan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam pengelolaan kegiatan melalui penyesuaian besarnya bobot tugas dan kewenangan yang dibebankan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KPG/03.01/1122.B/DPPKB

TENTANG
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

+

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran Organisasi dapat dilihat pada Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - c. bahwa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD adalah untuk mengukur kinerja dan pertanggung jawaban kegiatan pada setiap instansi/PD
 - d. bahwa untuk tujuan dimaksud pada hurup a.b dan huruf c diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Purewakarta tentang Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1698 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968, Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 200 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 59, TLNRI Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLN Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
12. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD TAHUN 2022 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

Pasal 1

KEDUA

: Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD adalah dokumen pelaporan kinerja pada PD terkait selama periode 1 (satu) tahun;
2. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah merupakan laporan hasil capaian dan realisasi capaian kinerja selama periode 1 (satu) tahun anggaran;

Pasal 2

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi :

1. Sebagai pertanggung jawabana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi PD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai evaluasi kerja selama periode 1 (satu) tahun anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Sebagai media hubungan kerja organisasi;
4. Sebagai media akuntabilitas;

5. Sebagai media informasi umpan balik perbaikan kinerja;
6. Sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta ini ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purwakarta government. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA", "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "H. VAYAT H. VAYAT, S. Sos" and the NIP number "Nip. 19700215 199703 1 009" are printed.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan);
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
5. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta;
6. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG.03.01/11.22.A

TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus 1 Tahun Anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahu 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenrdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Preseiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 204 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Pembentukan TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta 2022 terdiri dari Pejabat dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Menugaskan kepada Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk:

- a. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
- b. Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
- c. Membuat Rekap DPA tahun laporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap kegiatan, jumlah harga

barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap kegiatan yang ada pada DPA tersebut;

- d. Mengumpulkan rencana strategik 5 tahun yang telah di buat;
- e. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu penerimaan DPA (Memindahkan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DPA yang akan dilaksanakan);
- f. Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) atas dasar penetapan kinerja (isi RKT dimaksud adalah semua kegiatan yang ada pada DPA tahun yang dilaporkan dan telah sesuai dilaksanakan);
- g. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan;
- h. Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
- i. Melakukan Evaluasi kinerja;
- j. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan);
- k. Analisis efektivitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak);

KETIGA

- : l. Analisis Akuntabilitas (untuk mengetahui antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi);

- m. Melakukan penyusunan LAKIP (Narasi LAKIP);

KEEMPAT

:

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
ABUPATEN PURWAKARTA



H. YAYAN HIDAYAT, S.Sos
NIP.19700215 199703 1 009

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
Nomor : KPG.03.01/11.22.A
Tanggal : 31 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	sekretaris	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 5. Staf Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 6. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA


H. VAYAT H. DAYAT, S.Sos
NIP.19700215 199703 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang terangkum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perwujudan tujuan nasional tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia jauh lebih baik dari yang sebelumnya sehingga mampu meningkatkan derajat bangsa Indonesia dalam satu tatanan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Salah satu bentuk dari perwujudan tujuan nasional yang mengacu pada reformasi ekonomi pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Perwujudan tersebut memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini berpengaruh pula pada pemerintah Kabupaten Purwakarta yang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004. Pemerintah

Kabupaten Purwakarta melakukan perampingan atau penggabungan dari berbagai kantor pada tingkat kabupaten ke dalam tatanan dinas daerah kabupaten.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu instansi yang berada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta juga merupakan salah satu konsekuensi dari lahirnya otonomi daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta penjabarannya dalam perencanaan kinerja (RENJA) Tahun 2022, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022. Hasil proses tersebut dikomunikasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 148);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2020 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta membentuk Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala,
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokas, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dan
 - 3. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Pengolahan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan
 - 3. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, terdiri :
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun , Anak, dan Lanjut Usia
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Remaja ; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- f. Jabatan Fungsional ; dan
- g. UPTD terdiri Atas :
 - 1. UPTD Wilayah I;
 - 2. Uptd Wilayah II; dan
 - 3. UPTD Wilayah III.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

1. Tugas Pokok.

Berdasarkan Tugas Pokok Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas pembantu yang diberikan kepada daerah dalam hal ini tugas pokok Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. Pembinaan ketatausahaan dinas dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta perlu didukung oleh aparatur yang mampu baik secara kualitas maupun dari segi kuantitas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini didukung dengan 47 pegawai yang tersebar pada sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Jumlah tersebut terdiri dari 40 PNS 3 PTT dan 4 Sukwan.

Berikut adalah sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, golongan ruang dan jenjang pendidikan.

Tabel 1.1

**Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Eselonering dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022**

No	Eselonering	Jumlah	Pendidikan									S3
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	Eselon IIa	1								1		-
2	Eselon III a	1									1	-
3	Eselon III b	3								1	2	-
4	Eselon IV a	5			1			1		3		
5	Eselon IV b	3								2	1	
6	Jabatan Fungsional IV a	9								4	5	
7	Pelaksana Fungsional Umum	12			12							
8	PTT	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
9	Sukwan	8	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-
10	THL	3			2					1		
	Jumlah :	48	1	1	23	-	-	1	-	13	9	-

Tabel 1.2
Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2022

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1	IV c	1
2	IV b	-
3	IV a	4
4	III d	8
5	III c	6
6	III b	2
7	III a	1
8	II d	12
9	II c	-
10	II b	-
11	II a	-
12	I d	-
13	I c	-
14	I b	-
15	I a	-
	Jumlah :	34

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 tersebut diatas, komposisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang adalah pegawai struktural dan 47 (empat puluh tujuh) orang merupakan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sehingga jumlah keseluruhan dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejumlah 34 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak

17 orang, Golongan II sebanyak 12 orang, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 3 (tiga) orang serta Sukarelawan sebanyak 8 (empat) orang dan THL 3 (tiga) orang.

Komposisi pegawai jika dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 9 orang, Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 13 orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 7 orang, SLTP sebanyak 23 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Selanjutnya dari sisi eselonering Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdapat 44 jabatan struktural terdiri atas jenjang jabatan struktural eselon IIa sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIa sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIb sebanyak 3 (tiga) orang dan eselon IVa sebanyak 5 orang, eselon IVa. Jafung 9 orang dan eselon IVb sebanyak 3 orang.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan OPD yang mempunyai struktur dengan fungsi dan peranan yang sebanding dengan OPD lainnya. Kemudian secara kuantitas jumlah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta masih kurang memadai unruk ukuran sebuah OPD (Dinas) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

1.5. Aspek Strategis Organisasi (ISU Strategis)

Isu strategis dirumuskan dengan cara menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal sehingga isu strategis akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi

- c. Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah
- d. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana di lapangan
- e. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat;
- f. Masih rendahnya pemahaman tentang masalah kependudukan
- g. Masih kurangnya frekuensi KIE diberbagai tingkatan;
- h. Kurangnya Advokasi kepada steak holder;
- i. Masih tingginya Unmet Need;
- j. Tingkat DO yang tinggi;
- k. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendidik Anak Balita, Remaja dan Lansia;
- l. Kurangnya pemahaman Remaja tentang kesehatan produksi Remaja;
- m. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dibentuk Kampung KB.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2022 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program- program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahun 2022

dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Unsur Penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peranan dalam pencapaian Misi Kesatu yaitu :

"MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP".

2.2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan Bupati Purwakarta dilakukan pada awal bulan Januari tahun 2022 yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kinerja antara kepala DPPKB dengan Sekretaris dan kepala bidang di lingkungan DPPKB tentang Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada alokasi anggaran yang ada.

Pernyataan perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan agar sekretaris dan kepala bidang dapat melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan sehingga Kepala Dinas dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Organisasi, menilai keberhasilan organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pertanggungjawaban kepala badan kepada bupati.

2.3. Formulir Pernyataan Kinerja Tahun 2022

Formulir pernyataan kinerja tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Formulir pernyataan kinerja tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3	4
1.	Mewujudkan kerjasama lintas sektor baik pemerintahan maupun swasta dalam pengelolaan kependudukan KB dan Pembangunan (KKBPK)	Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	100 persen
			Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	100 persen
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin	100 persen
			Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	100 persen
			Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	100 persen
Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon)	100 persen			
2	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui kelembagaan keluarga kecil bahagia	Meningkatnya kualitas kampung KB.	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	34 kampung KB

	sejahtera			
		Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.	Cakupan kelompok tri bina	1.387 kelompok
		Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil.	Cakupan ekonomi keluarga	169 UPPKS
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan.	Cakupan masyarakat, Keluarga se Kabupaten Purwakarta	1.538 Kelompok
4	Mengendalikan jumlah kelahiran menuju penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi	Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal	15 Sekolah
			1. Membentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan tingkat B80 SLTA dan SMK	10 Sekolah
			2. Sosialisasi Madrasaha Siaga Kependudukan (MTS dan MAN)	3 Sekolah
			3. Sosialisasi Pondok Pesantren Siaga Kependudukan	2 Sekolah
			5. Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial	48 kali 17 kecamatan
			6. Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan	1 kali dalam 1 tahun
			1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,82

		2. Angka Kelahiran (TFR)	2,39
		1. Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi	100 Persen
		2. Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	7.677.266.900,-	
2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	7.012.404.885,-	
3.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	562.155.300,-	

Formulir Pernyataan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdiri dari indikator sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan indikator kinerja.

Kegiatan, yang meliputi : masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) berikut rencana capaiannya. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai 6 (enam) sasaran strategis, 17 (tujuh belas) indikator, 3 (tiga) program, sedangkan sasaran penyediaan alat bantu dan obat kontrasepsi Kabupaten Purwakarta

diakomodir dari dana APBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat (DAK KB Non Fisik BOKB).

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disajikan tersendiri.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal

Sasaran Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dengan indikator Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 86 persen dengan alokasi anggaran Rp. 800.00.00,- dengan Subkegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

Indikator Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi menetapkan target kinerja tahun 2022 target 86 persen dengan alokasi anggaran Rp. 4.545.721.000,- dengan Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, dan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.

Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin menetapkan target kinerja tahun 2022 target 100 persen dengan alokasi anggaran Rp. 174.695.900,- dengan Subkegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Indikator Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP menetapkan target kinerja tahun 2022 target 100 persen dengan alokasi anggaran Rp. 921.600.000,- dengan Subkegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 100 persen dengan alokasi anggaran Rp. 1.188.000.000,- dengan Subkegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,

Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB).

Indikator Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 100 persen dengan alokasi anggaran Rp. 47.250.000,- dengan Subkegiatan Pengendalian Pendistribusian Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

Indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 1;1 PLKB/PKB dengan alokasi anggaran Rp. 859.549.488,- dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Sebaran TPD.

Indikator Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 35 persen dengan alokasi anggaran Rp. 247.695.000,- dengan kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kampung KB

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kampung KB dengan indikator Cakupan Kesertaan Masyarakat dalam Ber KB menetapkan target kinerja tahun 2022 target 34 Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp 586.500.000,- dengan Subkegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK dikampung KB (uraian pertemuan kelompok kerja dikampung KB ketahanan keluarga).

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Balita Anak dan Remaja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Balita Anak dan Remaja dengan indikator Cakupan Kelompok Tribina menetapkan target kinerja tahun 2022 target 1.397 kelompok dengan alokasi anggaran Rp 249.421.585,- dengan Subkegiatan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLPPKS, PIK,R dan PEK).

4. Sasaran Meningkatnya kualitas Kelompok Usaha Menengah Kecil.

Sasaran Meningkatnya kualitas Kelompok Usaha Menengah Kecil dengan indikator Cakupan Ekonomi Keluarga menetapkan target kinerja tahun 2022 target 169 UPPKS dengan

alokasi anggaran Rp 894.579.500,- dengan Subkegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL,PPKS.PIK.-R dan PEK/UPPKAS dan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

5. Sasaran Meningkatnya ketahanan keluarga melalui aktifitas keluarga dalam kelompok kegiatan.

Sasaran Meningkatnya ketahanan keluarga melalui aktifitas keluarga dalam kelompok kegiatan dengan indikator Cakupan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS menetapkan target kinerja tahun 2022 target 1.538 Kelompok dengan alokasi anggaran Rp 5.046905.000,- dengan Subkegiatan Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, PEK/UPPKS.555

6. Sasaran Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK.

indikator Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal, menetapkan target kinerja tahun 2022 target 15 sekolah dengan alokasi anggaran Rp 99.998.550,- dengan kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, dan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.

indikator Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial, menetapkan target kinerja tahun 2022 target 48 kali 17 kecamatan dengan alokasi anggaran Rp 342.139.750,- dengan Subkegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.

indikator Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan, menetapkan target kinerja tahun 2022 target 1 kali dalam 1 tahun dengan alokasi anggaran Rp 342.139.750,- dengan Subkegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.

indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Angka Kelahiran (TFR) menetapkan target kinerja tahun 2022 target 1,82 dengan alokasi anggaran Rp 70.011.500,- dengan Subkegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

Indikator Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi, dan Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan menetapkan target kinerja tahun 2022 target 100 Persen dengan alokasi anggaran Rp 50.005.500,- dengan Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan Penetapan Pengukuran Kinerja (PPK) meliputi Penetapan Capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran, kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. Capaian indikator kinerja adalah tingkatan keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$-X \geq 85$:	Baik
$-71 \leq X < 85$:	Cukup
$-56 \leq X < 70$:	Kurang
$-X < 56$:	Sangat Kurang

Adapun rumus yang digunakan penilaian di atas, adalah sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \text{ pencapaian} \\ \text{Target tingkat} \\ \text{capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \text{ pencapaian} \\ \text{Target tingkat} \\ \text{capaian} \end{array} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rincian pengukuran kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target kinerja. Setelah ditetapkan pengukuran kinerja dan nilai capaian, lalu dilakukan pembobotan. Beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai pengukur kinerja (DPPKB) adalah sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi dan kebijakan/peraturan.
- b. Keluaran (Output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dalam suatu kegiatan. Output dapat berupa fisik dan atau non fisik.
- c. Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Dampak (impact) adalah pengaruh baik positif maupun negatif yang timbul pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan didasarkan kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) pada Tahun 2022 Hasil Pengukuran kinerja disajikan pada lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana rata-rata hasil pengukuran kinerja kegiatan termasuk pada kriteria baik.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) atau dampak (*impacts*). Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana target sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung atau pun penghambat pencapaian penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja perlu dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan pengukuran kinerja kegiatan tahun 2022 yang dijabarkan dengan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Untuk dapat melihat capaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2022 dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Pencapaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang berkaitan dengan Misi Kesatu : *“Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas Melalui Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi”*, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1

Sasaran : Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tercapai /Tidak Tercapai	Target Akhir Renstra	Ket.
1	Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik
		Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik

		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik
		Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik
		Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)					
		Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon)	100 Persen	86 Persen	A	86 Persen	Baik

Keterangan : A = Baik, B = Cukup, C = Kurang, D = Sangat Kurang

Sasaran Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, dengan Indikator Cakupan Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) target tahun 2022 sekitar 100 persen realisasi 86 persen.

Indikator Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi target tahun 2022, sekitar 100 persen realisasi 86 persen

Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin target tahun 2022, sekitar 100 persen realisasi 86 persen.

Indikator Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP target tahun 2022, sekitar 100 persen realisasi 86 persen.

Indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) target tahun 2022, sekitar 100 persen realisasi 86 persen.

Indikator Efektifitas dan efesiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alokon), target tahun 2022, sekitar 100 persen realisasi 86 persen.

2. Pencapaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang berkaitan dengan Misi Kedua : *“Mewujudkan ketahanan keluarga secara optimal melalui pembinaan keluarga”* sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. berikut di bawah ini :

Tabel 3.2

Sasaran : Meningkatnya kualitas kampung KB, Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja, Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil, dan Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tercapai /Tidak Tercapai	Target Akhir Renstra	Ket.

1	Meningkatnya kualitas kampung KB	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	34 Kampung KB	34 Kampung KB	A	34 Kampung KB	Baik
2	Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja	Cakupan kelompok tri bina	1.387 Kelompok	1.387 Kelompok	A	1.387 Kelompok	Baik
3	Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil	Cakupan ekonomi keluarga	169 UPPKS	169 UPPKS	A	169 UPPKS	Baik
4	Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan	Cakupan Kelompok BKB,BKR ,BKL,PIK-R,UPPKA	1.538 Kelompok	1.538 Kelompok	A	1.538 Kelompok	Baik

Keterangan : A = Baik, B = Cukup, C = Kurang, D = Sangat Kurang

Sasaran Meningkatnya kualitas kampung KB, dengan Indikator Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB target tahun 2022, 34 Kampung KB realisasi 34 Kampung KB.

Sasaran Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja, dengan Indikator Cakupan kelompok tri bina target tahun 2022, 1.387 Kelompok realisasi 1.387 Kelompok.

Sasaran Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil, dengan Indikator Cakupan ekonomi keluarga target tahun 2022, 169 UPPKS realisasi 169 UPPKS.

Sasaran Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan, dengan Indikator Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA target tahun 2022, 1.538 Kelompok realisasi 1.538 Kelompok.

3. Pencapaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 yang berkaitan dengan Misi Ketiga dan ke IV : *"Mengembangkan jejaring kemitraan dan pengelolaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga"* dan *"Membangun data base kependudukan yang valid dan akuntabel dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan daerah"* sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. berikut di bawah ini.

Tabel 3.3

Sasaran : Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tercapai /Tidak Tercapai	Target Akhir Renstra	Ket.
1	Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal	15 Sekolah	15 Sekolah	A	A	Baik

	Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial	48 kali 17 kecamatan	48 kali 17 kecamatan	A	A	Baik
	Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan	1 kali dalam 1 tahun	1 kali dalam 1 tahun	A	A	Baik
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,82	1,82	A	A	Baik
	Angka Kelahiran (TFR)	2,39	2,39	A	A	Baik
	Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi	100 Persen	100 Persen	A	A	Baik

		Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	100 Persen	100 Persen	A	A	Baik
--	--	--	------------	------------	---	---	------

Keterangan : A = Baik, B = Cukup, C = Kurang, D = Sangat Kurang

Sasaran Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK, dengan Indikator Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal target tahun 2022 15 Sekolah, realisasi 15 Sekolah.

Sasaran Penguatan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan Indikator Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan target tahun 2022, 1 kali dalam 1 tahun realisasi 1 kali dalam 1 tahun .

Sasaran Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran dengan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) target tahun 2022, 1,82 realisasi 1,82, dan Indikator Angka Kelahiran (TFR) target tahun 2022, 2,39 realisasi 2,39.

Sasaran Perluasan Cakupan KB dengan Indikator Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi target tahun 2022, 100 Persen realisasi 100 Persen, dan Indikator Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan target tahun 2022, 100 Persen realisasi 100 Persen.

Pencapaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Perumusan rencana keuangan dilakukan melalui mekanisme penyusunan rencana kerja Anggaran (RKA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rencana Keuangan disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan, alokasi biaya atau input yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun anggaran.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada APBD Perubahan Tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 19.828.330.344,- atau 89,1 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 22.262.945.267,-. Anggaran dan Realisasi Belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diimplementasikan melalui kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Purwakarta dan DAK.

Tabel 3.4

Rincian Anggaran DPPKB Kabupten Purwakarta

No.	Rincian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Tidak Langsung	5.843.304.424	
2.	Belanja Langsung	16.419.640.843	
	Jumlah :	22.262.945.267	

Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan jenis belanja yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 5.843.304.424,- (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), belanja barang dan jasa sebesar Rp. 16.419.640.843,- (Enam Belas milyar empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat empat puluh tiga rupiah), dan belanja modal sebesar Rp. 1.802.630.334,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus tiga puluh tiga

ratus tiga puluh empat rupiah) sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022, untuk belanja pegawai sebesar Rp. 5.108.025.639,- (lima milyar seratus delapan juta dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), tercapai anggaran sekitar 86,8 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.187.815.854,- (tiga belas milyar seratus delapan tujuh juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), pencapaian anggaran sekitar 100%, dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.802.630.334,- (satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan pencapaian anggaran belanja modal tahun 2022 sekitar 99,16%. Adapun pencapaian anggaran keuangan terkait dengan Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

**Rincian Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPPKB
Kabupaten Purwakarta**

PROGRAM	SUB.KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN Rp	REALISASI Rp	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.305.600	12.385.600	93,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.247.100	10.327.100	91,82

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKB Tahun 2022

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.119.800	174.859.800	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.450.600	4.484.700	53,07
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.500.000	7.100.000	67,62
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.300.000	98,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.218.500	13.218.500	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.855.500	7.528.250	44,65
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.282.850	71.766.600	94,08
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.189.900	24.350.000	75,64
	Faslitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	15.000.000	75,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.912.000	36.670.000	86,10
	Pengadaan Mebel	32.545.400	32373400	99,47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKB Tahun 2022

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.997.960	39.658.733	57,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.515.016	266.321.160	98,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	49.772.500	99,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.400.000	25.009.300	39,45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.928.632	29.872.121	96,58
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	43.600.000	15.530.000	35,62

Pencapaian Anggaran Keuangan yang terkait dengan program Dukungan Manajemen Administrasi Perakntoran sebesar Rp. 1.034.068.858,- (satu milyar tiga puluh empat juta enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan) terealisasi Rp. 887.527.764,- (delapan delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) capaian anggaran sekitar 85,8%.

Adapun pencapaian anggaran keuangan yang terkait dengan kinerja misi 1 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.6

**Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja Misi 1
Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas Melalui Program Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi Remaja**

Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1. Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	7.677.266.900,-	7.134.811.834,-	92,9

Pencapaian anggaran keuangan yang terkait dengan kinerja misi I yaitu Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas Melalui Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja sebesar **Rp 7.677.266.900,-** terealisasi **Rp. 7.134.811.834,-** capaian Anggaran sekitar **92,9%**.

Adapun pencapaian anggaran keuangan terkait dengan kinerja Misi dua : yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Kinerja Misi II : Mewujudkan Ketahanan Keluarga Secara Optimal melalui Pembinaan Keluarga.

Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1. Meningkatnya kualitas kampung KB	586.500.000,-	586.500.000,-	100
2. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja	249.421.450,-	249.421.450,-	100
3. Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil	1.124.101.800,-	1.124.101.800,-	100
4. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga dalam Kelompok Kegiatan	5.046.905.000,-	4.356.355.000,-	86,3
JUMLAH	7.006.928.250,-	6.316.378.250,-	90,1

Pencapaian anggaran keuangan yang terkait dengan kinerja misi II : yaitu Mewujudkan Ketahanan Keluarga Secara Optimal melalui Pembinaan Keluarga yaitu anggaran sebesar **Rp. 7.006.928.250,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.316.378.250,-** capaian anggaran sekitar 90,1 %.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Misi III
III “Membangun Jejaring Kemitraan dan Pengelolaan Kependudukan KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)”

Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	562.155.300,-	559.260.350,-	99,5

Pencapaian anggaran keuangan yang terkait dengan kinerja misi III & IV : yaitu sasaran Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK, anggaran yang tersedia sebesar **Rp 562.155.300,-** terealisasi sekitar **Rp. 559.260.350,-** capaian anggaran sekitar **99,5%**.

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum di fokuskan :

1. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk dan seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang dilandasi prinsip –prinsip keterbukaan, kepercayaan, akuntabilitas, kebersamaan, partisipasi dan kesetaraan menuju kemandirian.

Oleh karena itu, mekanisme perencanaan dan evaluasi kegiatan harus mampu menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan, sehingga prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja merupakan kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan mengacu kepada prinsip tersebut diatas, di harapkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan dasar perencanaan yang telah disusun, akan berdampak positif terhadap hasil yang telah ditetapkan sesuai target, dan pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Kesimpulan dari paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan rencana penetapan kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategi dengan indikator kinerja sebanyak 17 (tujuh belas) indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, berdasarkan hasil penilaian skala ordinal, capaian kinerja sasaran Tahun 2022.
2. pada umumnya semua sasaran kinerja tercapai menunjukkan angka keberhasilan dengan kriteria baik yang pada sasaran satu Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, sasaran dua Meningkatnya kualitas kampung KB, sasaran tiga Meningkatkan kualitas Balita, Anak dan Remaja, sasaran empat Meningkatkan kualitas

- kelompok usaha menengah kecil, sasaran lima Meningkatkan ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan, dan sasaran ke enam Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Pencapaian daya serap keuangan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten purwakarta secara keseluruhan sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 sekitar 90.28 persen terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.108.025.639,- belanja barang dan jasa Rp. 13.187.815.854,- belanja modal Rp. 1.802.630.334,-.

LAMPIRAN

**RENCANA AKSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,305,600	Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√				2 Dokumen	12,385,600	93.1
			√					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,247,100	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				1 dokumen	10,327,100	91.8
			√	√	√			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175,119,800	Pembinaan Tentang Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah I,II dan III	√	√	√		5 balai penyuluh	174,859,800	99.9
			√	√	√	√		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,843,304,424	Melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	12 bulan	5,073,175,639	86.8
			√					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,450,600	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√				1 dokumen	4,484,700	53.1
			√	√	√			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,500,000	Melakukan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	√		1 dokumen	7,100,000	67.6
			√	√	√	√		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,218,500	Melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	7 item	13,218,500	100.0
			√					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	Melakukan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√					49,300,000	98.6
			√	√	√	√		Penyediaan peralatan rumah tangga	16,855,500	Melakukan Penyediaan peralatan rumah tangga	√	√	√	√	11 item	7,526,250	44.7
			√	√	√			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76,282,850	Melakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√		19 item	71,766,600	94.1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
			4	5	6	7					8	9	10	11			
			√	√	√		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32,189,900	Melakukan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√		9 item	24,350,000	75.6	
			√	√	√		Fasilitas Kinjungan Tamu	20,000,000	Melakukan Fasilitas Kinjungan Tamu	√	√	√		12 bulan	15,000,000	75.0	
			√	√	√		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,912,000	Melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√		12 bulan	38,670,000	86.1	
				√			Pengadaan Mebel	32,545,400	Melakukan Pengadaan Mebel		√			2 item	32,373,400	99.5	
			√				Penyediaan Jasa Surat menyurat	2,000,000	Melakukan Penyediaan Jasa Surat menyurat	√				200 lembar	2,000,000	100.0	
			√	√	√	√	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	68,997,960	Melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	√	√	√	√	12 bulan	39,658,733	57.5	
			√	√	√	√	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270,515,016	Melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	12 bulan	266,321,160	98.4	
			√	√	√		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000	Melakukan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√		5 unit	49,772,500	99.5	
			√	√	√	√	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,400,000	Melakukan Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	√	106 unit kendaraan	25,009,300	39.4	
			√				Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,928,632	Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√				2 item	29,872,121	96.6	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
			4	5	6	7					8	9	10	11			
			√				Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43,600,000	Melakukan Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				100 persen	15,530,000	35.6	
				√			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten	74,999,850	Melakukan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten		√			1 dokumen	74,560,850	99.4	
	Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan	Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal	√				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	24,998,700	Pembinaan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	√				19 sekolah	24,998,700	100.0	
			√				Pealksanaan Saraschan Hasil Pemuktahiran data keluarga	54,969,900	Melakukan Saraschan Hasil Pemuktahiran data keluarga	√				255 orang	54,969,900	100.0	
	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	√	√	√	√	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	70,011,500	Melakukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	√				1 dokumen	69,897,500	99.8	
		2. Angka Kelahiran (TFR)	√	√	√		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	50,005,500	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	√	√	√		3 kegiatan	50,005,500	100.0	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
			4	5	6	7					12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perluasan Cakupan KB	1. Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi	√					Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	74,400,000	Melakukan Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	√				2 kegiatan	73,642,040	99.0
		2. Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	√					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja	4,375,000	Melakukan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja	√				1 kegiatan	4,375,000	100.0
	Penguatan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial	√	√	√	√		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	95,640,000	Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	√	√	√	√	1 kegiatan	95,620,000	100.0
		Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan		√				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	124,999,750	Melakukan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		√			2 kegiatan	124,185,000	99.3
			√	√	√	√		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	121,500,000	Melakukan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	√	√	√	√	5 balai penyuluh	119,992,800	98.8
	Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	√	√	√			Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	800,000,000	Melakukan Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	√	√	√		12 kali	798,388,700	99.8
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	√	√	√	√		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1,188,000,000	Melakukan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	√	√	√	√	66 bulan	1,188,000,000	100.0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
			4	5	6	7					8	9	10	11			
		Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	√	√	√	√		921,600,000	Melakukan Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	√	√	√	√	12 bulan	921,600,000	100.0	
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)		√	√	√		47,250,000	Melakukan Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		√	√	√	105 faskes	47,250,000	100.0	
		Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	√	√	√			1,163,499,000	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	√	√	√		7 jenis	1,163,170,200	100.0	
				√	√			100,000,000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		√	√		500 kasus	100,000,000	100.0	
			√	√				2,682,222,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	√	√			4 item	2,197,607,234	81.9	
			√	√	√			600,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	√	√	√		2 kegiatan	544,099,800	90.7	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin		√				174,695,900	Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB			√		17 kecamatan	174,695,900	100.0	
	Meningkatnya kualitas kampung KB	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	√	√	√			586,500,000	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	√	√	√		3 kegiatan	586,500,000	100.0	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%
			I	II	III	IV					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan	Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA	√	√	√	√		Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5,046,905,000	Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	√	√	√	√	1 kegiatan	4,355,628,800	86.3
	Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja	Cakupan kelompok tri bina	√	√	√	√		Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	249,421,585	Melakukan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	√	√	√	√	4 kegiatan	242,880,700	97.4
	Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil	Cakupan ekonomi keluarga		√	√			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	234,998,800	Melakukan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)		√	√		4 kegiatan	234,728,800	99.9
				√				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	729,000,000	Melakukan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS		√			2 item	723,523,500	99.2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				OUTPUT	REALISASI	%	
			I	II	III	IV					I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					√	√		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	165,579,500	Terwujudnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga dalam Kelompok Kegiatan				√	√	2 kegiatan	165,449,500	99.9
							Jumlah		22,262,945,267							20,098,471,827	90.3	

Purwakarta, Desember 2022

Kepala Dinas

Pengendalian Keuangan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta



H. SAYAT-HIDAYAT, S. Sos
NIP. 19730215 199703 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Dana yang dibutuhkan	1 tahun	13,305,600	
					Output	Jumlah Dokmen Renja yang disusun	100%		
					Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun	11,247,100	
					Output	Jumlah Dokumen LAKIP 2021 yang disusun	100%		
					Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	Jumlah dana waktu dan pelaksanaan	1 tahun	175,119,800	
					Output	Jumlah Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan di UPTD 1, 2 dan 3	100%		
					Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Jumlah dana dan Waktu Pelaksanaan kegiatan	1 Tahun Anggaran	5,843,304,424	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		
					Outcome	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		
				Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun Anggaran	8,450,600	
					Output	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%		
					Outcome	Meningkatnya Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	10,500,000	
					Output	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah DPPKB TA. 2021	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun Anggaran	13,218,500	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	50,000,000	
					Output	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%		
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	16,855,500	
					Output	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan peralatan rumah tangga	100%		
				Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Input	Jumlah Dana wwaktu pelaksanaan kegiatan	1 Tahun anggaran	76,282,850	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logostik Kantor	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan Bahan Logostik Kantor	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Jumlah Dana wwaktu pelaksanaan kegiatan	1 Tahun anggaran	32,189,900	
					Output	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%		
				Fasilitas Kinjungan Tamu	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	20,000,000	
					Output	Jumlah Sosialisasi kebutuhan kunjungan tamu	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Jumlah dana waktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	44,912,000	
					Output	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
				Pengadan Mebel	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	32,545,400	
					Output	Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	100%		
					Outcome	Jumlah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan	1 Tahun anggaran	2,000,000	
					Output	Terlaksananya Jasa Surat menyurat	100%		
					Outcome	TersedianyaJasa Surat menyurat	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan	1 Tahun anggaran	68,997,960	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%		
					Outcome	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan	1 Tahun anggaran	270,515,016	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		
					Outcome	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan	1 Tahun anggaran	50,000,000	
					Output	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor DPKKB kabupaten Purwakarta	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Tersedianya Pembangunan pagar kantor DPPKB kabupaten purwakarta	100%		
				Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Jumlah dana dan waktu Pelaksanaan kegiatan	1 tahun	63,400,000	
					Output	Terlaksananya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
					Outcome	Meningkatnya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
				Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	30,928,632	
					Output	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		
				Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	43,600,000	
					Output	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100%		
			Program Pengendalian Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	74,999,850	
					Output	Jumlah Dokumen grand design pembangunan kependudukan	100%		
					Outcome	eningkatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota	100%		
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun anggaran	24,998,700	
					Output	Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100%		
				Pealksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran data keluarga	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun	54,969,900	
					Output	Terlaksananya Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	100%		
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun anggaran	70,011,500	
					Output	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	100%		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	50,005,500	
					Output	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	100%		
				Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun anggaran	74,400,000	
					Output	Terlaksananya Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	100%		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja		Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	4,375,000	
						frekuensi advokasi KIE bersama mitra dan stakeholder	1 kegiatan		
						Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB sesuai	100 persen		
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	95,640,000	
					Output	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	100%		
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	124,999,750	
					Output	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100%		
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	121,500,000	
					Output	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100%		
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	800,000,000	
					Output	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya Pembinaan IMP dan Program KBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100%		
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	1,188,000,000	
					Output	Jumlah PLKB Non ASN yang mendapatkan honorarium	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100%		
				Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Trwulan	921,600,000	
					Output	Terlaksananya Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	100%		
				Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	47,250,000	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Output	Terlaksananya pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	100%		
					Outcome	Meningkatnya pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	100%		
				Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Input	Jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan	1 Tahun Anggaran	1,163,499,000	
					Output	Terlaksananya Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	100%		
					Outcome	Terpenuhinya Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	100%		
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	100,000,000	
					Output	Jumlah kasus dukungan ayoman	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100%		
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	100%	2,682,222,000	
					Output	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%		
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun anggaran	600,000,000	
					Output	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100%		
				Penguatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesehatan Reproduksi	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun anggaran	174,695,900	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Output	Terlaksananya Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	100%		
				Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Input	Jumlah dana	1 Tahun anggaran	586,500,000	
					Output	Terlaksananya Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	100%		
					Outcome	Meningkatnya Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	100%		
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LPPKS	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	100%	729,000,000	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Output	Terlaksananya pelayanan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		
					Outcome	Terintegrasikan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun Anggaran	165,579,500	
					Output	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Terintegrasikan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		
				Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Jumlah dana,	100%	5,046,905,000	
					Output	Terlaksananya Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		
					Outcome	Meningkatnya Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	Input	Jumlah dana SDM , Waktu pelaksanaan	12 bulan	249,421,585	
					Output	Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	100%		
					Outcome	Tersedianya Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan	100%		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun Anggaran	234,998,800	
					Output	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonmi keluarga/UPPKS)	100%		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Outcome	Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	100%		
JUMLAH							22,262,945,267		

Purwakarta, Desember 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta



H. AYAT HUDA'AT, S.Sos
NIP. 19700215 199703 1 009

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Dana yang dibutuhkan	1 tahun	13,305,600	12,385,600	93	
		Output	Jumlah Dokmen Renja yang disusun	2 dokumen				
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun	11,247,100	10,327,100	92	
		Output	Jumlah Dokumen LAKIP 2021 yang disusun	1 dokumen				
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	Jumlah dana waktu dan pelaksanaan	1 tahun	175,119,800	174,859,800	100	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Jumlah Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan di UPTD 1, 2 dan 3	5 Balai Penyuluh 12 kegiatan				
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Jumlah dana dan Waktu Pelaksanaan kegiatan	1 Tahun Anggaran	5,843,304,424	5,073,175,639	87	
		Output	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%				
	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun Anggaran	8,450,600	4,484,700	53	Sesuai Kebutuhan
		Output	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Outcome	Meningkatnya Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input	Dana yang dibutuhkan	Tahun	10,500,000	7,100,000	68	
		Output	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah DPPKB TA. 2021	1 Dokumen				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan	1 Tahun Anggaran	13,218,500	13,218,500	100	
		Output	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	50,000,000	49,300,000	99	
		Output	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 item				
		Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%				
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Input	Jumlah dana, dan Waktu Pelaksanaan		16,855,500	7,526,250	45	Sesuai Kebutuhan

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	orang				
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan peralatan rumah tangga	%				
	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Input	Jumlah Dana wwaktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	76,282,850	71,766,600	94	
		Output	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logostik Kantor					
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan Bahan Logostik Kantor	%				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Jumlah Dana wwaktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	32,189,900	24,350,000	76	
		Output	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%				
	Fasilitas Kinjungan Tamu	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	20,000,000	15,000,000	75	
		Output	Jumlah Sosialisasi kebutuhan kunjungan tamu	12 bulan				
		Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Jumlah dana waktu pelaksanaan kegiatan	12 bulan	44,912,000	38,670,000	86	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Outcome	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%				
	Pengadaan Mebel	Input	Dana yang dibutuhkan		32,545,400	32,373,400	99	
		Output	Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	2 item				
		Outcome	Jumlah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100%				
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan		2,000,000	2,000,000	100	
		Output	Terlaksananya Jasa Surat menyurat	%				
		Outcome	TersedianyaJasa Surat menyurat	%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan		68,997,960	39,658,733	57	Sesuai Kebutuhan
		Output	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	%				
		Outcome	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	%				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan		270,515,016	266,321,160	98	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%				
		Outcome	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%				
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Jumlah dan waktu Terlaksananya kegiatan		50,000,000	49,772,500	100	
		Output	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor DPPKB kabupaten Purwakarta	%				
		Outcome	Tersedianya Pembangunan pagar kantor DPPKB kabupaten purwakarta	%				
	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Jumlah dana dan waktu Pelaksanaan kegiatan	1 tahun	63,400,000	25,009,300	39	Sesuai Kebutuhan : ada beberapa unit kendaraan roda dua yang tidak bisa diperpanjang pajaknya karena rusak dan tidak ada DPPKB
		Output	Terlaksananya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Outcome	Meningkatnya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%				
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 tahun	30,928,632	29,872,121	97	
		Output	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%				
		Outcome	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%				
	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	43,600,000	15,530,000	36	Sesuai Kebutuhan
		Output	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100%				
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100%				
Program Pengendalian Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	74,999,850	74,560,850	99	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Jumlah Dokumen grand design pembangunan kependudukan	1 dokumen				
		Outcome	eningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota	1 kegiatan				
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 tahun	24,998,700	24,998,700	100	
		Output	Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100%				
		Outcome	Meningkatnya Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100%				
	Pealksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran data keluarga	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun	54,969,900	54,969,900	100	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	%				
		Outcome	Meningkatnya Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	%				
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun	70,011,500	69,897,500	100	
		Output	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	%				
		Outcome	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	%				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	50,005,500	50,005,500	100	
		Output	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	3 kegiatan				
		Outcome	Meningkatnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	1 kegiatan				
	Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	Input	Jumlah dana Waktu pelaksanaan	1 Tahun	74,400,000	73,642,040	99	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	%				
		Outcome	Meningkatnya Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB	%				
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja		Dana yang dibutuhkan	1 tahun	4,375,000	4,375,000	100	
			frekuensi advokasi KIE bersama mitra dan stakeholder	1 kegiatan				
			Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian dan KB sesuai	100 persen				
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 triwulan/ kegiatan	95,640,000	95,620,000	100	
		Output	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Outcome	Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	%				
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 tahun anggaran	124,999,750	124,185,000	99	
		Output	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	%				
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	%				
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Triwulan	121,500,000	119,992,800	99	
		Output	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	%				
		Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	%				
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 tahun	800,000,000	798,388,700	100	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	%				
		Outcome	Meningkatnya Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	%				
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Input	Dana yang dibutuhkan	1 tahun	1,188,000,000	1,188,000,000	100	
		Output	Jumlah PLKB Non ASN yang mendapatkan honorarium	66 bulan				
		Outcome	Meningkatnya Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100 persen				
	Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 Trwulan	921,600,000	921,600,000	100	
		Output	Terlaksananya Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	%				
		Outcome	Meningkatnya Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP)	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 tahun	47,250,000	47,250,000	100	
		Output	Terlaksananya pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	%				
		Outcome	Meningkatnya pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	%				
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Input	Jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan	1 Tahun Anggaran	1,163,499,000	1,163,170,200	100	
		Output	Terlaksananya Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	%				
		Outcome	Terpenuhinya Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Input	Dana yang dibutuhkan	tahun	100,000,000	100,000,000	100	
		Output	Jumlah kasus dukungan ayoman	500 kasus				
		Outcome	Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100%				
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	100%	2,682,222,000	2,197,607,234	82	
		Output	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	%				
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	%				
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Input	Dana yang dibutuhkan		600,000,000	544,099,800	91	
		Output	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	2 kegiatan				
		Outcome	Meningkatnya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan	100%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
	Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	100%	174,695,900	174,695,900	100	
		Output	Terlaksananya Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	%				
		Outcome	Meningkatnya Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	%				
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Input	Jumlah dana	100%	586,500,000	586,500,000	100	
		Output	Terlaksananya Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	%				
		Outcome	Meningkatnya Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	100%	729,000,000	723,523,500	99	
		Output	Terlaksananya pelayan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	%				
		Outcome	Terintegrasikan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	%				
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Jumlah dana, SDM dan Waktu Pelaksanaan	1 tahun	165,579,500	165,449,500	100	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	%				
		Outcome	Terintregasikan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	%				
	Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Jumlah dana,	1 tahun	5,046,905,000	4,355,628,800	86	
		Output	Terlaksananya Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan	%				
		Outcome	Meningkatnya Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan	%				

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN				RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	Input	Jumlah dana SDM , Waktu pelaksanaan	1 tahun	249,421,585	242,880,700	97	
		Output	Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	%				
		Outcome	Tersedianya Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	%				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Input	Dana yang dibutuhkan	1 tahun	234,998,800	234,728,800	100	

PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN (%)	KETERANGAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)				
1	2	3		4	5	6	7	8
		Output	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonmi keluarga/UPPKS)	3 kegiatan				
		Outcome	Meningkatnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	4 kegiatan				
Jumlah					22,262,945,267	20,098,471,827	90.28	

Purwakarta, Desember 2022

Kepala, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Purwakarta



H. VIKAT H. JAYAT, S. Sos

NIP. 19700715 199703 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**LAPORAN CASCADING KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
TAHUN 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
JL.PURNAWARMAN BARAT NO.5/9 PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dalam menekan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Desember 2022
Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Purwakarta



N. RAJAT EIDAYAT, S. Sos
NIP. 19700215 199703 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Gambaran Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Visi dan Misi	7
2.3 Tujuan	9
2.4 Sasaran	9
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	10
2.6 Cascading Kinerja	11
BAB. III PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil berkualitas.

Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia telah menjadi contoh bagaimana negara dengan penduduk terbesar keempat didunia dapat mengendalikan dan menerima gerakan keluarga berencana sebagai salah satu bentuk pembangunan keluarga yang lebih dapat dikendalikan untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan umum keluarga berencana adalah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial-ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1992, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretaris terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi terdiri dari
 - 1) Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perencanaan Penduduk
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
 - 3) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- d. Bidang Keluarga Berencana di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 - 3) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, bawah lima Tahun, Anak, dan lanjut usia
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Remaja
 - 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tiga UPTD yaitu :
 - 1) UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Purwakarta Wilayah kerja mencakup tujuh Kecamatan, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakan Cikao, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Cibatu.

- 2) UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sukatani meliputi lima wilayah kerja, Kecamatan Plered, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru dan, Kecamatan Maniis.
- 3) UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Wanayasa mencakup lima wilayah kerja, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Ponokslam, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes dan, Kecamatan Bojong.

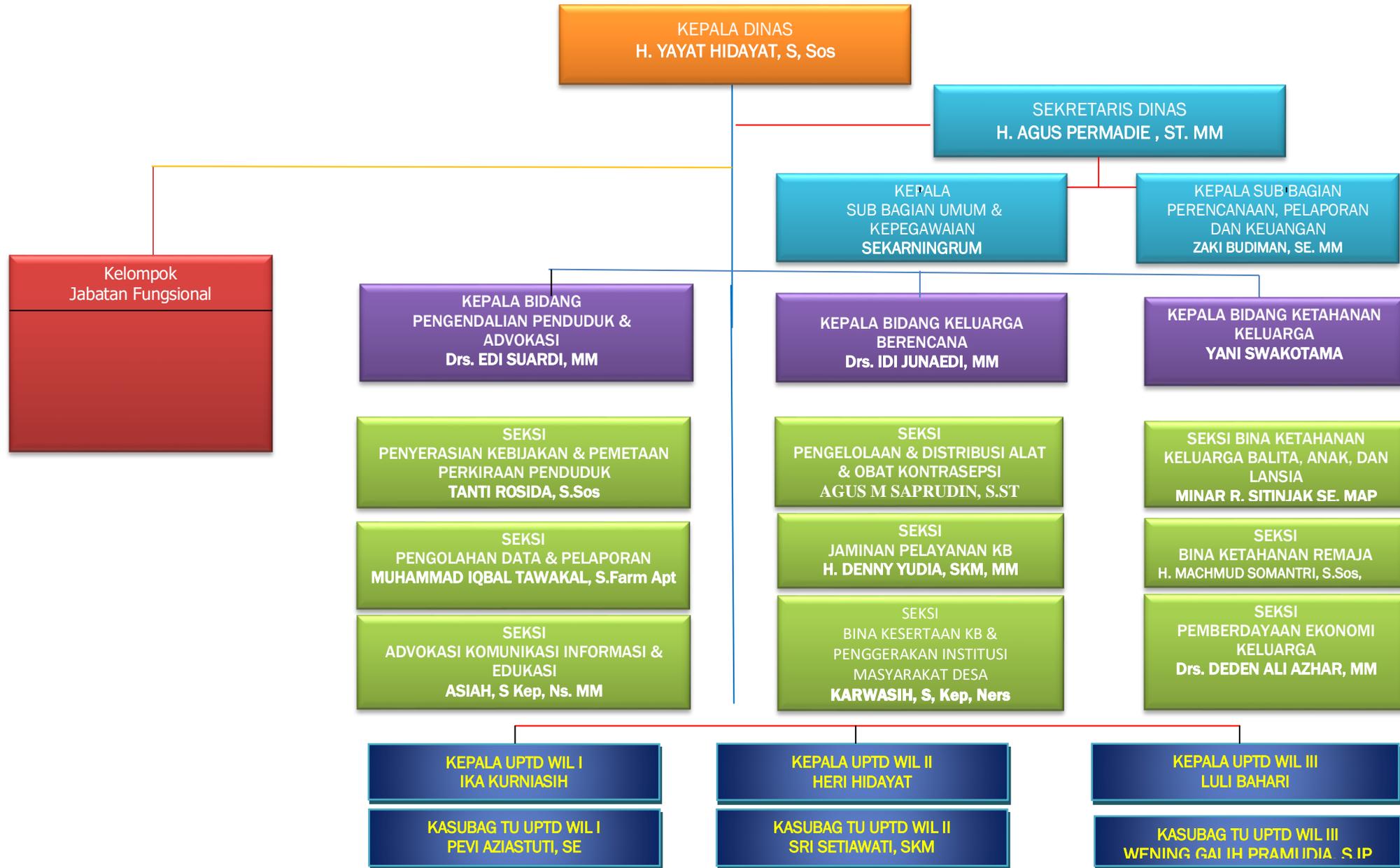
Setiap UPTD wilayah masing-masing di pimpin oleh :

- Kepala UPTD
- Subagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional

Dan masing-masing UPTD di pimpin oleh seorang UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara rinci struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**



1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, Latar Belakang, Gambaran Umum Keluarga Berencana, Struktur Organisasi dan Ruang Lingkup
- BAB II Perencanaan dan perjanjian kinerja, Informasi tentang rencana strategis, Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, Strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, dan atau Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023 yaitu:

Visi Kabupaten Purwakarta

Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Priode Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan purwakarta istimewa”.

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Purwakarta, penetapan Visi dan Misi DPPKB harus sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan purwakarta istimewa” untuk mencapai hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Membangun keluarga kecil dan berkualitas melalui program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
2. Mewujudkan Ketahanan Keluarga Secara Optimal Melalui Pembinaan Keluarga
3. Mengembangkan Jejaring Kemitraan dan Pengelolaan Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
4. Membangun Data Base Kependudukan yang Valid dan Akuntabel dalam Pelaksanaan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga,

Untuk menjadikan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah menetapkan 4 sasaran strategis yang

memiliki tujuan dan sasaran menyukseskan 4 Misi DPPKB, pengukuran kinerja yang dilakukan pada masing-masing kegiatan didasarkan pada nilai indikator masukan (Input) keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang diperoleh

2.2.3 Tujuan dan

Sasaran 2.2.3.1

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Memasyarakatkan pentingnya program keluarga berencana;
- 2) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga;
- 3) Masyarakat memahami program KKBPK.

2.2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Frekuensi Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Meningkatnya kualitas kampung KB
- 3) Meningkatnya kualitas balita, anak dan remaja
- 4) Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil menengah
- 5) Mengendalikan jumlah penduduk melalui program KKBPK.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Visi: “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”.	
Misi ke-satu: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	
Tujuan:	Sasaran:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa 2. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : ‘ Penduduk Terkendali Menuju Keluarga Sejahtera ‘	
Tujuan:	Sasaran:
1. Memasaryaktakan pentingnya program keluarga berencana	Meningkatkan Frekuensi Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	1. Meningkatkan kualitas kampung KB 2. Meningkatnya kualitas balita, anak dan remaja 3. Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil menengah
3. Masyarakat memahami program KKBPK	Mengendalikan jumlah penduduk melalui program KKBPK

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target dan arah strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2023. Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,

Kebijakan pembangunan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Keluarga Berencana.

sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan publik, peningkatan partisipasi dalam pembangunan bangsa.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Keluarga Berencana Dalam penetapan kebijakan juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi serta antar satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Arah kebijakan untuk Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta periode 2022-2023 sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Purwakarta periode 2013-2018 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi SKPD Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Purwakarta periode 2018- 2023 dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Purwakarta

Visi: “Mewujudkan Purwakarta Istimewa “			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.			
Tujuan:	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa 2. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat 3. Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal 4. Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan 2. Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat 3. Peningkatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk 4. Penguatan Peran Koperasi dalam Sistem Bisnis Pertanian 5. Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja 3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender	6. Peningkatan Akses Ketersediaan Pangan dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat 7. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah 8. Penataan Jalan Lingkungan

2.4. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 berdasarkan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yaitu Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan fungsinya adalah antara lain :

1. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023 dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 4) Program Pengendalian Penduduk

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan Program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikian Laporan Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman. Segala bentuk masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Purwakarta, Desember 2022
Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta


H. AYAT H. AYAT, S. Sos
NIP. 19702215 199703 1 009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Satuan Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Tahun Anggaran : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	100	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp 800,000,000
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp 800,000,000
Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	100	100	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alokasi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Rp 4,545,721,000
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 1,163,499,000
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Rp 100,000,000
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 600,000,000
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp 2,682,222,000

	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin	100	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp	174,695,900
			Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp	174,695,900
	Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	100	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp	921,600,000
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp	921,600,000
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	100	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp	1,188,000,000
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp	1,188,000,000
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	100	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alokasi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Rp	47,250,000
			Pengendalian Pendistribusian Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp	47,250,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas kampung KB	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	34 Kampung KB	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 586,500,000
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK dikampung KB (uraian pertemuan kelompok kerja dikampung KB dan Ketahanan Keluarga	Rp 586,500,000
Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja	Cakupan kelompok tri bina	1.387 Kelompok	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 249,421,585
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK,R Dan PEK)	Rp 249,421,585
Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil	Cakupan ekonomi keluarga	UPPKS : 169	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 234,998,800
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan PEK/UPPKS	Rp 234,998,800

			Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 894,579,500
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (bkb,bkr,bkl,ppks,pik-r,pek/uppk)	Rp 165,579,500
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 729,000,000
Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan	Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA	1.538 Kelompok	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 5,046,905,000
			Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS PIK-R PEK /UPPKS)	Rp 5,046,905,000
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal	15 Sekolah	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 99,998,550

			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp	24,998,700
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	74,999,850
			Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp	342,139,750
5. Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial	48 kali 17 kecamatan		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp	95,640,000
6. Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan	1 kali dalam 1 tahun		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Rp	124,999,750
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp	121,500,000
1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.82		Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp	70,011,500
2. Angka Kelahiran (TFR)	2.39		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rp	70,011,500
1. Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi	100 Persen		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	50,005,500

	2. Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	100 Persen	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp	50,005,500
--	---	------------	--	----	------------

Purwakarta, Desember 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Purwakarta



H. YAYATI DAYAT, S.Sos

NIP: 19700215 199703 1 009

CASCADING POHON KINERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

VISI : "Penduduk Terkendali Menuju Keluarga Sejahtera

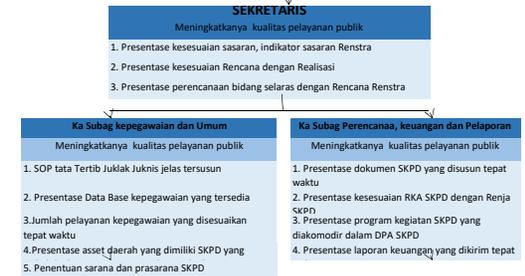
MISI : Pertama : "Membangun keluarga kecil dan berkualitas melalui Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi"

Kedua : "Mewujudkan ketahanan keluarga secara optimal melalui pembinaan keluarga"

Ketiga : "Mengembangkan jejaring kemitraan dan pengelolaan kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)"

- Tujuan :
1. Mengendalikan jumlah kelahiran menuju penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi
 2. Mewujudkan kerjasama lintas sektor baik pemerintahan maupun swasta dalam pengelolaan kependudukan KB dan Pembangunan (KKBP)
 3. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui kelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera

KEPALA	
SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	1. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
2. Meningkatnya kualitas kampung KB.	2. Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi
3. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.	3. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia subur
4. Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil.	4. Cakupan peran serta
5. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan.	5. Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berer
6. Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBP	6. Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alokon)
	7. Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber KB
	8. Cakupan Kelompok Tri Bina
	9. Cakupan Ekonomi Keluarga
	10. Cakupan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA
	11. Pengembangan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, informasi dan non formal
	12. Media elektronik, media cetak, media luar ruang dan media sosial
	13. Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangsa Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan
	14. Laju pertumbuhan penduduk
	15. Angka Kelahiran
	16. Cakupan Pelaporan data pelayanan kontrasepsi
	17. Cakupan pelaporan data pengendalian lapangan



KABID. KELUARGA BERENCANA

SASARAN : Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal

INDIKATOR

1. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
2. Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi
3. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20
4. Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP
5. Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB)
6. Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alokon)

KABID. PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.
2. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.
3. Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil.
4. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam

INDIKATOR

1. Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber KB
2. Cakupan Kelompok Tri Bina dan Remaja.
3. Cakupan Ekonomi Keluarga
4. Cakupan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA

KABID. PENGENDALIAN PENDUDUK

SASARAN :

11. Pengembangan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, informasi dan non formal
12. Media elektronik, media cetak, media luar ruang dan media sosial
13. Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangsa Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan
14. Laju pertumbuhan penduduk
15. Angka Kelahiran
16. Cakupan Pelaporan data pelayanan kontrasepsi
17. Cakupan pelaporan data pengendalian lapangan

Kasie. Pengelolaan dan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi

Kasie. Jaminan Pelayanan KB

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB

Kasie. Bina Kesertaan KB dan Penggerakan IMD

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Bina Kesertaan KB dan Penggerakan IMD
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Bina Kesertaan KB dan Penggerakan IMD
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Bina Kesertaan KB dan Penggerakan IMD

Kasie. Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga, Bawah 5 Thn, Anak & Lanjut Usia
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga, Bawah 5 Thn, Anak & Lanjut Usia
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga, Bawah 5 Thn, Anak & Lanjut Usia

Kasie. Bina Ketahanan Remaja

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Bina Ketahanan Remaja
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Bina Ketahanan Remaja
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Bina Ketahanan Remaja

Kasie. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kasie. Penyerasian Kebijakan dan pemetaan perkiraan Penduduk

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Penyerasian Kebijakan dan pemetaan perkiraan Penduduk
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Penyerasian Kebijakan dan pemetaan perkiraan Penduduk
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Penyerasian Kebijakan dan pemetaan perkiraan Penduduk

Kasie. Pengolah Data dan Pelaporan

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan data dan pelaporan
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan pengolahan data dan pelaporan
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengolahan data dan pelaporan

Kasie. Advokasi dan KIE

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral

1. Presentase penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Adv. dan KIE
2. Presentase pembinaan atas penyelenggaraan Adv & KIE
3. Presentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Adv & KIE.